

**APLIKASI AKAD IJARAH MUTANHIYA BITTAMLIK DI
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH TEKUN
SAHABAT MANDIRI DESA KEBONAN KECAMATAN KARANGGEDE
KABUPATEN BOYOLALI (Prespektif Fatwah DSNMUI No: 27/ DSN-
MUI/III/2002)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Progam Studi Strata I Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Disusun Oleh :

Nadya Bani Kisyanti
I000160014

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

APLIKASI AKAD IJARAH MUTANHIYA BITTAMLIK DI

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH TEKUN

SAHABAT MANIRI DESA KEBONAN KECAMATAN KARANGGEDE

KABUPATEN BOYOLALI (Prespektif Fatwah DSN MUI No: 27/ DSN-MUI/III/2002)

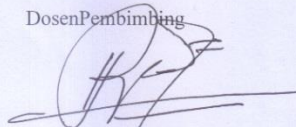
Oleh:

NADYA BANI KISYANTI

I000160014

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Drs. HARUN M.H

NIDN. 0605085701

HALAMAN PENGESAHAN

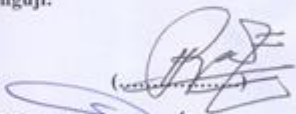
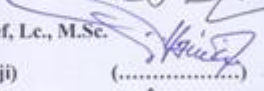
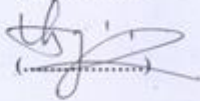
APLIKASI AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK DI
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH TEKUN
SAHABAT MANIRI DESA KEBONAN KECAMATAN KARANGGEDE
KABUPATEN BOYOLALI (Prespektif Fatwah DSN MUI No: 27/ DSN-
MUI/III/2002)

Oleh:

NADYA BANI KISYANTI
I000160014

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta Pada Hari Rabu, 2 November 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat Memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H)

Dewan Penguji:

1. Drs. Harun, MH.
(Ketua Dewan Penguji) 
2. Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc.
(Anggota I Dewan Penguji) 
3. Drs. Muthoifin, M.Ag.
(Anggota II Dewan Penguji) 



Dekan


Dr. Syamsul Hidayat, M. Ag.

NIDN. 0605096402

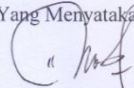
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak beneran dalam pernyataan saya di atas maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 8 Desember 2020

Yang Menyatakan



Nadya Bani Kisianti

**APLIKASI AKAD IJARAH MUTANHIYA BITTAMLIK DI
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH TEKUN
SAHABAT MANIRI DESA KEBONAN KECAMATAN KARANGGEDE
KABUPATEN BOYOLALI (Prespektif Fatwah DSNMUI No: 27/ DSN-
MUI/III/2002)**

Abstraks

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan Lembaga Keuangan Syariah yang cukup pesat saat ini, salah satunya KSPPS Tekun Sahabat Mandiri Desa Kebonan. KSPPS Tekun Sahabat Mandiri Desa Kebonan adalah salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan prinsip syariah. Salah satu fungsi yang ada yaitu menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan akad *ijarah muntahiya bittamlik*. Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut (1) Untuk mengetahui penerapan akad *ijarah muntahiya bittamlik* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tekun Sahabat Mandiri Desa Kebonan Kecamatan Karanggrde Kabupaten Boyolali (2) Untuk mengetahui analisa fatwah DSN MUI No:27/DSN-MUI/III/2002 terhadap akad *ijarah muntahiya bittamlik* di Kopersi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Desa Keboanan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan dengan metode kualitataif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumen, dan anget. Berdasarkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi akad *ijarah muntahiya bittamlik* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tekun Sahabat Mandiri Desa Kebonan Kecamatan Karanggrde Kabupaten Boyolali belum sesuai dengan hukum Islam karena ada salah satu rukun dan syarat yang tidak dipenuhi yaitu dari segi ujahnya dimana KSPPS menggunakan bagi hasil yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwah DSN MUI No:27/DSN-MUI/III/2002 “Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah (Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*”.

Kata Kunci : Akad Ijarah Muntahiya Bitamlik, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tekun Sahabat Mandiri Desa Kebonan Kecamatan Karanggrde Kabupaten Boyolali, *Ujrah*.

Abstract

This research is motivated by the rapid development of Islamic Financial Institutions at this time, one of which is Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tekun Sahabat Mandiri Kebonan Village Kranggede District Boyolali Regency. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tekun Sahabat Mandiri Kebonan Village Kranggede District

Boyolali Regency is a Sharia Financial Institution that uses sharia principles. One of the existing functions is channeling funds in the form of financing using the *ijarah muntahiya bittamlik* contract. The objectives of this study are as follows (1) To find out the application of the *ijarah muntahiya bittamlik* contract at the Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tekun Sahabat Mandiri Kebonan Village Karanggede District Boyolali Regency (2) To find out the analysis of fatwah DSN MUI No: 27 / DSN-MUI / III / 2002 regarding the *ijarah muntahiya bittamlik* contract at the Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tekun Sahabat Mandiri Kebonan Village Karanggede District Boyolali Regency. This type of research is field research (*field research*) with a descriptive qualitative method. Collecting data using interview methods, documents, and questionnaires. Based on the results of this study, it shows that the application of the *ijarah muntahiya bittamlik* contract in the Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tekun Sahabat Mandiri Tekun Sahabat Mandiri Kebonan Village Karanggede District Boyolali Regency has not complied with Islamic law because there are one pillars and conditions that are not met, namely in terms of the term where KSPPS uses profit sharing that is not in accordance with the provisions of the MUI DSN fatwah No: 27 / DSN-MUI / III / 2002 "All the pillars and conditions that apply in the *Ijarah* contract (Fatwa DSN number: 09 / DSN-MUI / IV / 2000) also apply to the contract. al-Ijarah al-Munjukiyah bi al-Tamlik ”.

Keywords: Ijarah Muntahiya Bitamlik Akad, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tekun Sahabat Mandiri Tekun Sahabat Mandiri Kebonan Village Karanggede District Boyolali Regency, Ujah.

1. PENDAHULUAN

Dalam ekonomi islam, pemilik mutlak dari semua jenis sumber daya adalah Allah. Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah kepada manusia. Manusia harus memanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia, yaitu untuk diri kita sendiri dan orang lain. Namun yang terpenting adalah kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat (Ahmad:2008).

Koperasi sendiri berdasarkan bahasa Inggris, dari kata co-operation yang artinya bekerja sama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, koperasi merupakan perserikatan yang bertujuan untuk memenuhi keperluan anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga yang murah. Sehingga keberadaan koperasi sangat tepat guna membantu perekonomian

penduduk yang berpendapatan rendah. Selain itu, keberadaan kopersai juga dapat mendukung sector-sektor informasi yang saat ini banyak digulati oleh sebagian besar penduduk Indonesia (Lindiawati:2018).

Koperasi syariah sendiri lahir sejak menjamurnya pendirian beberapa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang pada pertama kali dirintis oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992. BMT berbasis kegiatan ekonomi kerakyatan dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, letak perbedaannya dengan Koperasi Konvensional (nonsyariah) hanya terletak pada teknis operasionalnya saja, Koperasi Syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usaha (Sofia:2012).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Sedangkan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan sistem intermediasi keuangan ditingkat mikro yang didalamnya terdapat Baitul Maal dan Baitul Tamwil yang dalam operasionalnya dijalankan dengan merupakan prinsip-prinsip syariah (Cantika:2019).

Banyak dari sebagian masyarakat yang masih beranggapan bahwa lembaga keuangan syariah tidak ada bunga karena berlandaskan hukum islam. Bahkan mereka beranggapan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan syariah itu sama saja dengan sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional, padahal kedua sistem tersebut sangatlah berbeda. Oleh karena itu suatu lembaga keuangan syariah tidak lepas dari Fatwah Dewan Nasional Syariah. Untuk merumuskan dan menerapkan nilai atau prinsip hukum Islam agar keberadaan lembaga keuangan syariah tidak melenceng dari prinsip islam. Adapun DSN merupakan lembaga yang tergolong baru di MUI. Dimana, DSN-MUI dibentuk pada tanggal 10 Februari 1999, dengan dikeluarkannya SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI (Hamli:2018). Lembaga ini bertugas untuk mengawasi, meneliti dan mengkaji segala kegiatan yang

behubungan dengan kegiatan transaksi keuangan dengan merumuskan dalam bentuk fatwah. Dalam hal ini yang dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah adalah Fatwah DSN MUI NO.27/DSN-MUI/III/2002 tentang Akad Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tekun Sahabat Mandiri Syariah Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali merupakan koperasi yang menjalankan usaha sesuai prinsip syariah Islam. Adapun produk yang ditawarkan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tekun Sahabat Mandiri Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali kepada masyarakat adalah akad *mudharabah musytarakah* dengan prinsip bagi hasil. Akan tetapi masih banyak anggota yang belum mengetahui akad tersebut, kebanyakan dari anggota tidak mengetahui karena jauh lebih tertarik dengan akad *mudharabah* dan akad lain yang terdapat disana. Sebagai lembaga keuangan syariah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tekun Sahabat Mandiri Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali diharapkan menjalankan operasional usahanya sesuai dengan Fatwah DSN MUI.

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan informasi serta menambah pengetahuan masyarakat untuk memahami apa yang dimaksud dengan *ijarah muntahiyah bittamlik* serta dapat menjadi pengingat tentang pentingnya penerapan hukum Islam dalam Lembaga Keuangan Syariah.

2. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan berbagai macam strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-dokumen,

teknik teknik pelengkap. Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan (to describe and explore) dan tujuan yang kedua yaitu menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain) (Sandu:2015).

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif deskriptif yaitu melihat suatu situasi sosial dengan berusaha merekam sebanyak-banyaknya informasi yang disampaikan oleh informan, kemudian disusun dan dijelaskan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Penulis menggunakan metode wawancara, dokumen, dan angket dalam pengumpulan data. Wawancara biasanya dilakukan dalam bentuk pertemuan formal, dimana si peneliti sangat diperlukan keterampilan bertanya untuk menggali informasi yang diperlukan (Eri:2016). Kuesioner merupakan suatu cara pengumpulan data, dimana peneliti bertanya jawab dengan responden menggunakan angket (daftar pertanyaan) (Eri:2016).

Untuk mendapatkan informasi yang maksimal peneliti memberikan kuisisioner kepada anggota KSPPS.

Table 1. Daftar Nasabah Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah Tekun Sahabat Mandiri Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.

No	Nama	Jangka Waktu	Pinjaman	Akad
1	Bpk Joko	24 bulan	50.000.000	IMBT
2	Bu Tatik	24 bulan	20.000.000	IMBT

Sumber data: dimiliki dan diolah oleh penulis

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisa Terhadap Penerapan Akas Ijarah Muntahiya Bittamlik di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Tekun Sahabat Mandiri Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) diharapkan dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang ada. Dengan adanya pembiayaan-pembiayaan tersebut diharapkan mampu memacu masyarakat untuk bisa menciptakan usaha dan mampu mengembangkannya. Pada kenyataannya mayoritas produk pembiayaan KSPPS saat ini masih terfokus pada produk-produk *Mudharabah* dan masih banyaknya masyarakat yang kesulitan mengembangkan usahanya karena faktor modal. Secara konsep, *ijarah muntahiya bittamlik* adalah salah satu bentuk akad yang memiliki tujuan untuk mengambil manfaat atas suatu jasa berupa barang yang jelas dalam tempo waktu yang jelas diikuti dengan adanya pemberian kepemilikan barang yang bersifat khusus dengan adanya ganti yang jelas.

حدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفِيعَةَ عَنْهُمَا قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

Artinya: "Hadis dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya". (H.R.Bukhari) (Sri:2018)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah mengupah.

Pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* yang di KSPPS Tekun Sahabat Mandiri adalah akad atau kesepakatan antarasatu atau beberapa pihak, yang mana satu pihak sebagaipemberi sewa yaitu KSPPS dan anggota sebagai penyewa, untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

Pada pelaksanaannya anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *ijarah muntahiya Bittamlik* di KSPPS Tekun Sahabat Mandiri atau bagian marketing mendatangi anggotayang ingin melakukan pengajuan pembiayaan

ijarah muntahiya bittamlik. Setelah semua persyaratan dipenuhi, KSPPS Tekun Sahabat Mandiri melakukan analisa pembiayaan dengan memperhatikan beberapa faktor, yaitu: anggota/calon anggota dapat dipercaya, kemampuan anggota dalam membayar angsuran, jaminan yang diberikan calon anggota baik secara fisik maupun non fisik. Apabila pengajuan diterima maka selanjutnya pihak KSPPS akan memproses pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* tersebut, setelah itu penandatanganan yang dilakukan kedua belah pihak.

Pada praktik setelah dilakukan pembiayaan *ijarah muntahita bittamlik* oleh pihak KSPPS Tekun Sahabat Mandiri Karanggede, maka pembiayaan tersebut menjadi kepemilikan oleh kedua belah pihak baik pihak KSPPS maupun pihak anggota, meskipun anggota sudah melakukan DP (Down Payment).

Prosedur pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* di KSPPS Tekun Sahabat Mandiri Karanggede sudah sesuai syariah atau belum dapat dilihat dari rukun *ijarah muntahiya bittamlik* adalah sebagai berikut: *Aqid (Mu'jir dan musta'jir)* Pihak yang melakukan akad terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir*. Dalam praktik pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* di KSPPS Tekun Sahabat Mandiri dapat dilihat bahwa dari segi pihak yang melakukan akad sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dimana kedua belah pihak baik pihak KSPPS Tekun Sahabat Mandiri dan pihak anggota sudah sama-sama dewasa, baligh, berakal dan cakap dalam mengendalikan harta (*tasharuf*), serta kedua belah pihak saling sepakat untuk melakukan akad. *Sigat* akad (*ijab* dan *qobul*) *Sigat* merupakan kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak dalam berakad. Pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* akan terjadi dan sah apabila adanya *ijab* dan *qobul* pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan oleh kedua belah pihak. Menurut penulis pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* di KSPPS Tekun Sahabat Mandiri Karanggede sudah sesuai dengan hukum Islam, karena pihak KSPPS Tekun Sahabat Mandiri Karanggede menjelaskan apa yang ada dalam perjanjian pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* seperti jumlah total pinjaman, upah (*ujrah*) yang harus dibayar, jaminan yang harus disertakan oleh anggota. Setelah itu jika anggota menghendaki maka akan terjadi penandatanganan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. *Ujrah* (upah) adalah imbalan yang diterima

atas sebuah manfaat dari barang yang disewakan. *Ujrah* di KSPPS Tekun Sahabat Mandiri Karanggede sudah sesuai dengan hukum Islam.

Adapun prosedur pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* di KSPPS Tekun Sahabat Mandiri Karanggede sudah sesuai dengan syariah atau belum dapat dilihat dari syarat *ijarah muntahiya bittamlik*, sebagai berikut:

Pertama, kedua belah pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah muntahiya bittamlik*. Apabila salah satu dari kedua belah pihak melakukan kelalaian, maka akad *ijarah muntahiya bittamlik* tidak sah. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan yang dilakukan oleh pihak KSPPS Tekun Sahabat Mandiri Karanggede dan pihak anggota dalam penandatanganan perjanjian pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* maka akadnya sah.

Kedua, manfaat dari akad objek akad harus diketahui, jika manfaat dari objek tersebut tidak jelas dan menyebabkan perselisihan maka akad tersebut tidak sah karena akan menghalangi terjadinya proses penyerahan dan penerimaan dari objek pembiayaan sehingga tidak terlaksananya maksud dari akad tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Hal ini dibuktikan dengan adanya manfaat *sigah (ijab dan qobul)* yang ada maka akad yang dilakukan akan sah.

Berdasarkan prosedur tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* di KSPPS Tekun Sahabat Mandiri Karanggede sudah sesuai dengan ketentuan syariah.

3.2 Analisa Fatwah DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Tekun Sahabat Mandiri Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali

Otoritas fatwah ekonomi syariah Indonesia berada dibawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwah yang dikeluarkan oleh DSN MUI mengenai masalah ekonomi syariah khususnya bagi lembaga pembiayaan syariah yang menjadi rujukan mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS), bagi masyarakat yang melakukan interaksi dengan LKS di Indonesia.

Semua pembiayaan pada dasarnya memiliki prosedur yang sama, yang menjadi pembeda antara satu dan lainnya terletak pada akadnya. Dalam pembiayaan ini yang menjadi objek adalah akad *ijarah muntahiya bittalik*, dimana akad ini berisikan jasa pemanfaatan suatu barang. Di KSPPS Tekun Sahabat Mandiri Karanggede akad *ijarah muntahiya bittamlik* di jadikan salah satu contoh untuk konsep ekonomi Islam. Kebanyakan dari anggota KSPPS Tekun Sahabat Mandiri Karanggede masih belum begitu mengerti dan paham mengenai akad *ijarah muntahiya bittamlik* sehingga pihak KSPPS harus menjelaskan kepada anggota-anggotanya secara jelas dan detail sebelum terjadinya akad.

Ijarah muntahiya bittamlik adalah salah satu akad yang terdapat dalam perbankan Islam. Di KSPPS Tekun Sahabat Mandiri akad *ijarah muntahiya bittamlik* adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dimana terdapat pemberi sewa dan penyewa, dimana pihak KSPPS sebagai pemberi sewa dan pihak anggota sebagai penyewa, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

Menurut Fatwa DSN Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Pembiayaan Al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik sebagai berikut:

“Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewakan, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa”. Dengan demikian akad *ijarah muntahiya bittamlik* terdapat pemindahan kepemilikan dan hak kepemilikan dari yang menyewakan kepada penyewa.

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa ketentuan objek *ijarah muntahiya bittamlik* yang tertuang dalam akad *ijarah muntahiya bittamlik* antara anggota dengan KSPPS Tekun Sahabat Mandiri Karanggede sudah sesuai dengan ketentuan objek *ijarah muntahiya bittamlik* yang terdapat dalam fatwa DSN Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan Al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan, dan setelah mengadakan penelitian dan pembahasan secara seksama mengenai “Aplikasi Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Tekun Sahabat Mandiri Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Aplikasi akad *ijarah muntahiya bittamlik* yang terjadi di KSPPS Tekun Sahabat Mandiri Desa Kebonan Kecamatan Karanggede di mulai dari anggota mengajukan pembiayaan untuk biaya sewa ke KSPPS, kemudian pada saat pra pemberian akad pihak KSPPS melakukan analisis terdahulu terhadap calon anggota. Ketika semua analisis tersebut terpenuhi maka pihak KSPPS menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh anggota, kemudian Pihak KSPPS memberikan pinjaman kepada anggota. Penerapan akad *ijarah muntahiya bittamlik* di KSPPS Tekun Sahabat Mandiri Desa Kebonan Kecamatan Karanggede jika dilihat dari hukum Islam, dari segi rukun dan syarat *ijarah muntahiya bittamlik* sudah sesuai dengan hukum Islam karena pihak KSPPS sebagai pemberi sewa menyediakan barang yang diinginkan anggota. Dilihat dari kewajiban *mu'jir* dan *musta'jir* juga sudah sesuai karena pihak KSPPS sudah menyediakan set yang disewakan yang nantinya akan digunakan oleh *musta'jir*. Sedangkan jika dilihat mengenai besarnya *ujrah* yang ditentukan menggunakan bagi hasil sudah sesuai dengan objek *ijarah muntahiya bittamlik* yang terdapat dalam fatwa DSN Nomor 27/DSNMUI/III/2002 tentang pembiayaan *Al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik*.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan penelitian ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: KSPPS Tekun Sahabat Mandiri Desa Kebonan Kecamatan Karanggede di harapkan dapat mengoptimalkan semua akad yang ada baik itu *Mudharabah*, *Murabahah*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, dan *qard* sesuai dengan kebutuhan anggota terkait dengan produk-produk yang ditawarkan oleh KSPPS.

Pihak KSPPS perlu melakukan penelitian-penelitian mengenai LKS (lembaga keuangan syariah) baik itu BMT maupun KSPPS lain demi meningkatkan

kecakapan KSPPS dalam penerepan akad agar sesuai dengan kebutuhan anggota.

Perlu adanya pengkajian ulang mengenai akad yang akan digunakan oleh KSPPS agar kedepannya dapat diperoleh bentuk akad yang sempurna dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak baik itu pihak KSPPS sendiri dan pihak anggota.

DAFTAR PUSTAKA

Berlian, Eri. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Perss.

Lidiawati.2018. *Peranan Koperasi Syariah BMT Dalam MeningkatkanKwalitas Usaha Mikro*. Jakarta: University Of Indraprasra PGRI Jakarta.

Sodikin, M. Ali, Sandu Siyoto. 2015. *Dasar Metodoligi Penelitian*. Karanganyar: Literasi Media Publishing.

Sofian.2012. *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keungan Masyarakat Antara Religiusitas,Trend, Dan Kemudahan Layanan*. Bandung: Fakultas Politeknik Negeri Bandung.

Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.

Sumiyanto, Ahmad. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: ISES Publishing.

Syaifullah, Hamli. 2018. *Penerapan Fatwah DSN-MUI Tentang Murabahah Di Bank Syariah*. Jakarta: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah.

Wardhani, Cantika Ayu. 2019. *Perana Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada*

BMT Fajat Cabang Bandar Lampung.Lampung: Fakultas Ekonomi
Bisnis Dan Islam, Universitas Islam Negeri Lampung

Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press,
2018),hlm. 194